

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI *ONLINE*

(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

**Oleh:
Desvilia Putri**

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana muncul dari adanya kesalahan seperti dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk dengan sengaja memainkan perjudian *online* melalui situs website dengan penjara 1 (satu) tahun dengan denda Rp.5000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku judi *online*, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku judi *online*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilengkapi dengan data Narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online*, terdakwa Arzy bin Bahrudin terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan sosiologis yang menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa, serta menggunakan pertimbangan filosofis yang bertujuan menjatuhkan pidana kepada

Desvilia Putri

terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses pemedanasan.

Aparat penegak hukum diharapkan dalam penanganan tindak pidana perjudian online dapat lebih menitikberatkan pada pemenuhan dan pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya terkait perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana pembuktian berbasis digital serta kerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga perbankan guna menelusuri perbuatan dan sikap batin pelaku dalam melakukan perjudian *online*. Hakim diharapkan dapat memperkuat pertimbangan yuridis maupun non-yuridis dalam memutus perkara perjudian *online*, terutama dengan memperhatikan motif, pola keterlibatan, serta tingkat kesadaran pelaku dalam menggunakan sistem digital untuk melakukan perbuatan pidana. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan efek jera yang proporsional terhadap pelaku serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Judi *Online*, UU ITE.

ABSTRACT

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE

(Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

By

Desvilia Putri

Criminal liability is a form of responsibility borne by perpetrators of criminal acts for the fault they have committed. In other words, criminal liability arises from the existence of culpability, as reflected in Decision Number: 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, in which the defendant intentionally engaged in online gambling through a website and was sentenced to one (1) year of imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 (five million rupiah), subsidair one (1) month of imprisonment. Meanwhile, Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions stipulates a maximum penalty of six (6) years of imprisonment and a maximum fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah). The issues raised in this study are: how is criminal liability imposed on online gambling perpetrators, and what are the grounds considered by judges in imposing criminal sanctions on online gambling offenders.

The research method used in this thesis is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection techniques include library research and field research, supplemented by information obtained from resource persons consisting of a Judge of the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor from the Bandar Lampung Distric Attorney's Office, and a Legal Academic from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a Legal Academic from the University of Lampung.

Based on the results of the research, it is found that the criminal liability imposed on online gambling perpetrators shows that the defendant, Arzy bin Bahrudin, was legally and convincingly proven to have committed the criminal act of "Any person who intentionally and without authority distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing gambling content." In imposing the sentence, the judge applied juridical considerations based on facts revealed during the trial, sociological considerations in determining the severity of the sentence by examining the background of the defendant's actions, the consequences of the actions, and the personal circumstances of the defendant, as well as philosophical considerations aimed at imprpvng the

defendant's behavior through the process of punishment.

Law enforcement officials are expected, in handling online gambling crimes, to place greater emphasis on the fulfillment and proof of elements of criminal liability, particularly concerning the criminal act (actus reus) and culpability (mens rea). Therefore, support in the form of digital-based evidentiary tools and cooperation with internet service providers and banking institutions is required to trace both the actions and the mental attitude of perpetrators in committing online gambling offenses. Judges are also expected to strengthen juridical and non-juridical considerations in adjudicating online gambling cases, especially by taking into account the motives, patterns of involvement, and the level of awareness of perpetrators in utilizing digital systems to commit criminal acts. This approach is essential to ensure that judicial decisions not only fulfill legal certainty but also provide a proportional deterrent effect and prevent the recurrence of similar criminal offenses.

Keywords: Criminal Liability, Online Gambling, ITE Law.